

**KAPABILITAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN  
PERTAMANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT  
MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN  
TANJUNG RIAU KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM**

**ALIF FAJAR MELPA WIJAYA**

32.0319

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : [32.0319@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0319@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Kartiwi, S.Sos, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Tanjung Riau Village in Batam City, with a slum area of 19.62 hectares, has been identified as a priority location for the City Without Slums (KOTAKU) Program. While the program aims to improve settlement quality and community welfare, challenges remain in maximizing its impact on increasing community income and sustainable development. **Purpose:** This study aims to analyze the capability of the Department of Public Housing, Settlement, and Parks (Disperkimtan) of Batam City in increasing community income through the implementation of the KOTAKU Program, based on Amartya Sen's capability theory. **Method:** The research uses a qualitative descriptive approach with Amartya Sen's theoretical framework focusing on agency freedom and well-being freedom. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving program implementers, local community members, and stakeholders. **Results:** The study found that the KOTAKU Program (2019–2021) significantly contributed to improving physical infrastructure, socio-economic conditions, and the environment in Tanjung Riau. Disperkimtan demonstrated strong capability in facilitating both dimensions of freedom. Economic outcomes include a 25% increase in community income, 140% growth in micro and small enterprises (MSMEs), job creation, and a 160% increase in tourist visits. Supporting factors include government commitment, active community participation, resource availability, and effective stakeholder coordination. Meanwhile, administrative constraints, limited funding, uneven public awareness, and the impact of the COVID-19 pandemic were identified as inhibiting factors. **Conclusion:** The comprehensive and participatory approach of the KOTAKU Program proves effective in creating livable, productive, and sustainable settlements while enhancing local economic capacity.

**Keywords:** Capability, KOTAKU Program, Community Income.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kawasan Tanjung Riau di Kota Batam dengan luas kawasan kumuh sebesar 19,62 Ha menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Meskipun program ini bertujuan meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat, tantangan masih dihadapi dalam mengoptimalkan kontribusi program terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau, dengan menggunakan teori kapabilitas Amartya Sen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan

berdasarkan dua dimensi teori kapabilitas, yaitu kebebasan pelaku dan kebebasan kesejahteraan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU periode 2019–2021 memberikan dampak positif yang signifikan melalui intervensi fisik, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Disperkimtan menunjukkan kapabilitas yang baik dalam mengelola program pada kedua dimensi tersebut. Dampak ekonomi yang dicapai meliputi peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 25%, pertumbuhan UMKM sebesar 140%, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 160%. Faktor pendukung keberhasilan program antara lain dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, terdapat pula hambatan seperti kendala administratif, keterbatasan anggaran, kesadaran masyarakat yang belum merata, serta dampak pandemi COVID-19. **Kesimpulan:** Pendekatan komprehensif yang diterapkan Disperkimtan dalam Program KOTAKU terbukti efektif dalam menciptakan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kapabilitas, Program KOTAKU, Pendapatan Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di Indonesia, pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Namun, kemiskinan menjadi tantangan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Menurut Solikatur dkk. (2014), kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Riswanto (2016) menyebut kemiskinan sebagai masalah kompleks dan multidimensional yang memerlukan penanganan lintas bidang, baik individu maupun sosial. Kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sebagaimana dikemukakan oleh Marthalina (2018), turut memperburuk kondisi ini dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Provinsi Kepulauan Riau, meskipun memiliki potensi besar di sektor industri dan pariwisata, masih menghadapi tantangan serius dalam hal kesenjangan dan kemiskinan antar wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 138,30 ribu orang dari total populasi 2,183 juta jiwa.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau**

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karimun	5,92	6,85	6,87	5,95	5,78
2	Bintan	6,83	6,42	6,44	5,9	5,44
3	Natuna	6,36	4,95	5,32	5,25	5,04
4	Lingga	4,43	13,93	14,05	11,26	9,99
5	Kepulauan Anambas	13,85	7,09	7,51	6,95	6,67
6	Batam	4,75	5,05	5,19	5,02	4,85
7	Tanjung Pinang	6,56	9,57	9,85	7,95	6,68
8	Kepulauan Riau	9,37	6,12	6,24	5,69	5,37

Sumber: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2024, BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kota Batam, meskipun memiliki persentase penduduk miskin terendah di antara kabupaten/kota lain, tetap mengalami fluktuasi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Fenomena ini mencerminkan bahwa penurunan persentase tidak selalu berarti penurunan jumlah absolut penduduk miskin, karena pertumbuhan jumlah penduduk miskin masih lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Ketidakstabilan ekonomi global dan pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama peningkatan angka kemiskinan, terutama karena penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan di sektor informal (Ginting, 2021).

Salah satu aspek penting yang memperkuat korelasi antara kemiskinan dan pembangunan di Kota Batam adalah keberadaan permukiman kumuh. Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, permukiman kumuh didefinisikan sebagai kawasan tempat tinggal yang tidak layak huni karena masalah seperti kepadatan tinggi, infrastruktur tidak memadai, dan mutu bangunan rendah. Kondisi ini diperparah oleh urbanisasi dan migrasi pekerja dari berbagai daerah, serta ketidakmampuan pekerja sektor informal untuk mengakses hunian layak (Susilawati & Khairina, 2023). Menurut Sadyohutomo dalam Sadana (2014), penyebab utama munculnya permukiman kumuh adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan kota dan pendapatan masyarakat serta keterlambatan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Sebagai upaya penanganan, pemerintah meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan kelanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini ditujukan untuk mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sesuai arahan Direktorat Jenderal Cipta Karya (2016), KOTAKU mendukung gerakan "100-0-100", yakni 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program ini mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta didasarkan pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2018. Di Kota Batam, KOTAKU mulai dilaksanakan sejak 2018, dengan proyek percontohan di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang.

Mengacu pada SK Walikota Batam No. KPTS. 290/HK/X/2019, terdapat 1.675,59 hektar kawasan kumuh yang tersebar di 61 kelurahan di 12 kecamatan. Sekupang sendiri memiliki 150,63 hektar kawasan kumuh, dan Kelurahan Tanjung Riau merupakan salah satu kelurahan dengan kawasan kumuh seluas 19,62 hektar. Karakteristik kekumuhan di Tanjung Riau meliputi rumah semi apung, jalan rusak, bangunan padat dan tidak teratur, serta kurangnya infrastruktur dasar seperti drainase dan sistem sanitasi (Aguspriyanti dkk., 2020). Kampung ini juga dikenal sebagai salah satu dari 37 kampung tua di Batam, dengan nilai historis dan budaya Melayu yang kuat, namun mengalami tekanan dari kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang buruk.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini tertarik untuk mengkaji Kapabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung Riau sebagai studi kasus yang relevan dan strategis dalam konteks pembangunan perkotaan dan pengurangan kemiskinan.

## **1.2 Gap Penelitian**

Meskipun Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, kajian yang secara khusus menganalisis kapabilitas institusi pemerintah daerah, seperti Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam, dalam mengimplementasikan program ini masih terbatas, terutama pada tingkat lokal kelurahan. Selama ini, evaluasi Program KOTAKU lebih banyak berfokus pada hasil fisik atau teknis infrastruktur, sementara dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan

aspek sosial ekonomi belum banyak diteliti secara mendalam. Selain itu, penggunaan pendekatan teori kapabilitas Amartya Sen yang menekankan pada kebebasan bertindak (agency) dan kebebasan untuk hidup sejahtera (well-being) sebagai kerangka analisis dalam konteks pengentasan kawasan kumuh juga masih jarang ditemukan. Penelitian yang mengaitkan secara langsung antara pengurangan kawasan kumuh dan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai indikator kesejahteraan pun masih sangat terbatas. Di sisi lain, wilayah seperti Kelurahan Tanjung Riau, yang merupakan kampung tua dengan karakter budaya dan sosial ekonomi yang unik, belum banyak mendapat perhatian dalam penelitian, meskipun memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif kapabilitas Disperkimtan Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah menjadi fokus utama berbagai studi, dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Rahajuni dkk. (2018) mengkaji dampak KOTAKU di Kabupaten Banyumas dan menemukan bahwa program ini tidak hanya mengurangi kekumuhan, tetapi juga meningkatkan taraf ekonomi, memperkuat nilai sosial, serta membentuk kesadaran lingkungan berbasis kearifan lokal. Sementara itu, Sulaiman (2021) dalam penelitiannya di Kota Bandung menyoroti belum maksimalnya proses kolaborasi dalam pelaksanaan KOTAKU akibat hambatan koordinasi dan ego sektoral. Aisyahwati (2018) mengulas implementasi KOTAKU oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kota Malang dan mencatat keberhasilan program dalam pemetaan kawasan kumuh, meskipun partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Di sisi lain, Aguspriyanti dkk. (2020) secara spesifik mengidentifikasi faktor penyebab kekumuhan di Kampung Tua Tanjung Riau, seperti padatnya bangunan, minimnya infrastruktur, dan buruknya sanitasi. Dalam penelitian lanjutan, Aguspriyanti dkk. (2022) menyimpulkan bahwa program KOTAKU telah meningkatkan kualitas fisik permukiman di wilayah pesisir Batam, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk keberlanjutan program. Adapun penelitian teknologi oleh Muniandy et al. (2024) dan Hu et al. (2011, 2012) lebih menitikberatkan pada pengembangan sistem informasi perumahan dan model kapabilitas e-government, yang meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan KOTAKU, tetap memberikan kontribusi penting dalam konteks digitalisasi dan peningkatan kapabilitas pelayanan publik. Dengan demikian, meskipun telah banyak penelitian terkait KOTAKU, masih terdapat celah dalam studi yang menghubungkan kapabilitas institusi lokal khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung melalui pelaksanaan program ini, khususnya di wilayah seperti Kelurahan Tanjung Riau, Kota Batam.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus, pendekatan teori, dan konteks pelaksanaan yang digunakan, yang secara keseluruhan menjadi bentuk dari kebaruan ilmiah (novelty) dalam studi ini. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Dijan Rahajuni dkk. (2018) lebih menekankan pada dampak sosial Program KOTAKU terhadap masyarakat miskin, seperti meningkatnya nilai gotong royong dan kesadaran lingkungan. Sementara itu, Andi Lestari Sulaiman (2021) menitikberatkan pada aspek kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di Kota Bandung, dan Vian Frisca Aisyahwati (2018) berfokus pada implementasi program di tingkat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Dalam konteks wilayah Tanjung Riau sendiri, dua penelitian oleh Aguspriyanti dkk. (2020 dan 2022) telah mengulas faktor-faktor penyebab kekumuhan dan peningkatan kualitas fisik permukiman melalui program KOTAKU. Namun, semua penelitian tersebut belum secara khusus mengevaluasi bagaimana program ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara nyata. Fokus pada dimensi ekonomi—khususnya pendapatan—masih menjadi celah yang belum tergali secara mendalam dalam konteks program KOTAKU, baik di Batam maupun di lokasi-lokasi lain di Indonesia.

Kebaruan lain dalam penelitian ini juga terlihat dari pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas oleh Amartya Sen (1999), yang memandang kesejahteraan bukan hanya dari segi pendapatan semata, melainkan dari peluang atau kemampuan (capabilities) masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai penting. Pendekatan ini memberikan kedalaman analisis yang berbeda dibandingkan teori implementasi atau kolaborasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan kerangka kapabilitas, penelitian ini mencoba melihat bagaimana program KOTAKU tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga memperluas kapasitas ekonomi masyarakat melalui penciptaan peluang-peluang produktif.

Dari segi konteks lokal, penelitian ini mengambil Kelurahan Tanjung Riau di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai lokasi kajian. Wilayah ini telah beberapa kali dijadikan objek studi karena karakteristik kekumuhannya yang khas sebagai permukiman pesisir dan kampung tua. Namun demikian, belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik menelaah kapabilitas institusi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam, dalam menjalankan program KOTAKU untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan tersebut.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini dapat dirangkum dalam tiga aspek utama: (1) fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai indikator kesejahteraan, (2) penggunaan teori kapabilitas untuk menilai dampak program secara lebih menyeluruh, dan (3) analisis terhadap peran kelembagaan pemerintah daerah dalam konteks lokal yang belum banyak dikaji. Ketiga aspek ini menjadikan penelitian ini relevan dan berkontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai program penanggulangan kawasan kumuh di Indonesia.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang. Selain itu, penelitian juga ingin mengetahui bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan program tersebut. Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dinas dalam melaksanakan program KOTAKU guna meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna yang berkaitan dengan masalah sosial, sesuai dengan penjelasan Creswell (2009) yang menyatakan bahwa penulisan kualitatif bertujuan memahami makna dari sudut pandang

individu atau kelompok. Pendekatan deskriptif menurut Nazir (2014) dan Sugiyono (2017) adalah metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian secara sistematis dan faktual sesuai kondisi saat penelitian dilakukan. Sugiyono (2017) juga menambahkan bahwa pendekatan kualitatif lebih menitikberatkan pada penilaian subjektif tanpa menggunakan statistik, serta kualitatif deskriptif sering berupa studi kasus, yang dianggap cocok untuk penelitian ini karena fokus pada pendalaman permasalahan. Selain itu, dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretative, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel (Ridwan & Tungka, 2024). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati).

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan memecah konsep utama, yaitu kapabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Konsep kapabilitas mengacu pada teori Amartya Sen (1999) yang membagi dimensi menjadi pelaku (*agency freedom*) dan kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*), dengan indikator seperti partisipasi, akses sumber daya, pengembangan kapabilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Operasionalisasi ini memudahkan peneliti untuk memperjelas fokus dan batasan penelitian.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan seperti pejabat dinas terkait dan masyarakat, sementara data sekunder berasal dari dokumen, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan program KOTAKU (Arikunto, 2015). Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sesuai dengan Sugiyono (2017), untuk mendapatkan informan yang relevan dan mampu memberikan informasi lengkap mengenai program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau. Informan utama meliputi pejabat Dinas Perumahan Rakyat, Koordinator KOTAKU, Lurah setempat, serta masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program.

Instrumen penelitian pada metode kualitatif ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*, didukung oleh pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid (Sugiyono, 2017). Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan pedoman wawancara, menyiapkan alat untuk wawancara, dan mengatur waktu wawancara (Simangunsong, 2017:215). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara untuk menggali informasi secara mendalam, observasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana (Nazir, 2014), serta dokumentasi berupa catatan, foto, dan dokumen terkait program (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data (Sugiyono, 2017). Reduksi data bertujuan menyederhanakan dan memfokuskan data hasil observasi dan wawancara agar mudah dianalisis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap interpretasi menggabungkan hasil analisis dengan teori dan konteks sehingga menghasilkan makna yang relevan terhadap tujuan penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kapabilitas dinas dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program KOTAKU.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau**

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang dijalankan sejak tahun 2017 dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di perkotaan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Di Kota Batam, program ini menjadi upaya utama dalam mengatasi kawasan kumuh yang tersebar di beberapa kelurahan. Di kelurahan Tanjung Riau, program ini mulai direncanakan pada tahun 2018 dan baru terlaksana pada tahun 2019 dan sempat terhenti sementara pada awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 sebelum akhirnya selesai pada tahun 2021.

##### **A. Perencanaan Program (tahun 2018)**

Perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau dimulai pada 2018 dengan penetapan wilayah ini sebagai lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh di Kota Batam melalui SK Walikota Batam Nomor: KPTS. 290/HK/X/2019. Penetapan ini didasarkan pada potensi strategis Tanjung Riau, yang dekat dengan Pelabuhan Internasional Sekupang dan memiliki objek wisata seperti Pantai Marina, Cable Sky Park, Kebun Jambu, serta potensi ekonomi di sektor kuliner dan industri perbaikan kapal. Dari sisi sosial budaya, Tanjung Riau dikenal dengan tradisi "Pesta Anak Pantai" yang rutin dilaksanakan sebagai pelestarian budaya pesisir. Proses perencanaan dimulai dengan identifikasi dan pemetaan kawasan kumuh menggunakan metode participatory mapping yang melibatkan masyarakat, menunjukkan luas kawasan kumuh seluas 19,62 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan, terutama di permukiman pesisir semi apung. Selanjutnya, dilakukan penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Detail Engineering Design (DED) yang dikerjakan bersama Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Riau, dan tim fasilitator.

##### **B. Pelaksanaan Program (2019-2021)**

Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau dimulai resmi pada awal 2019 setelah dokumen perencanaan dan DED selesai. Program ini dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan dukungan tim koordinator kota. Pada 2019, fokus program adalah perbaikan infrastruktur dasar seperti pembangunan pelantar lingkar (469 m), pelantar penghubung (329 m), peningkatan kualitas jalan masuk Kampung Tua (384 m), serta pembangunan pedestrian (500 m), drainase (878 m), dan fasilitas publik lainnya sesuai masterplan yang mengutamakan aksesibilitas dan sirkulasi. Pada 2020, pelaksanaan sempat terhenti awal tahun karena pandemi COVID-19 dan realokasi anggaran, namun kembali berjalan pertengahan tahun dengan protokol kesehatan. Kegiatan tahun ini mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan persampahan (jaring sampah, tong sampah 3R), fasilitas sanitasi (toilet umum, IPAL komunal), dan pembangunan plaza utama sebagai ruang publik multifungsi. Tahap akhir program pada 2021 mencakup penyelesaian pedestrian, pemasangan lampu penerangan umum (43 titik), dan finalisasi infrastruktur yang tersisa, serta penguatan kelembagaan masyarakat untuk pemeliharaan hasil pembangunan.

##### **C. Bentuk Kegiatan dan Intervensi Program**

Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan dan intervensi yang komprehensif sesuai dengan masterplan yang telah disusun. Intervensi fisik mencakup pembangunan pelantar lingkar dan penghubung untuk meningkatkan konektivitas kawasan pesisir, peningkatan kualitas jalan dan pembangunan pedestrian sebagai akses yang lebih baik, serta pembangunan sistem drainase sepanjang jalan masuk guna

mengatasi genangan air. Selain itu, penyediaan fasilitas publik seperti toilet umum dan plaza utama sebagai ruang interaksi masyarakat juga dilakukan. Pengelolaan sampah ditingkatkan melalui pengadaan jaring sampah dan tong sampah 3R, pemasangan lampu penerangan umum untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta pembangunan gerbang dan signage sebagai penanda identitas kawasan. Dari sisi sosial dan ekonomi, program ini menitikberatkan pada penataan kawasan wisata berbasis kearifan lokal melalui Tourism Information Centre dan pengembangan event budaya tahunan Pesta Anak Pantai sebagai atraksi wisata. Penataan ruang terbuka publik difokuskan agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, disertai pelatihan keterampilan seperti kerajinan dan kuliner lokal serta pendampingan usaha mikro dan kecil untuk mengoptimalkan potensi kawasan. Sementara itu, intervensi lingkungan dilakukan dengan penanaman mangrove sebagai upaya konservasi pesisir, pengadaan sistem pengelolaan sampah terpadu, dan rehabilitasi drainase guna mencegah genangan air dan banjir. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, program KOTAKU bertujuan tidak hanya meningkatkan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kelurahan Tanjung Riau.

### **3.2 Kapabilitas Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan dalam Program KOTAKU**

#### **A. Analisis Dimensi Kebebasan Pelaku (Agency Freedom)**

Dimensi kebebasan pelaku (agency freedom) merupakan aspek penting dalam teori kapabilitas Amartya Sen yang menekankan kemampuan institusi untuk bertindak dan membuat keputusan yang memengaruhi pencapaian tujuan yang bernilai. Dalam konteks penelitian ini, kapabilitas Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam dalam melaksanakan Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau dianalisis melalui empat indikator utama: partisipasi dalam proses keputusan, akses terhadap sumber daya, pengembangan kapabilitas, serta kemandirian dan otonomi. Pertama, Disperkimtan memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum koordinasi tingkat kota yang mengakomodasi OPD terkait, kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat. Meskipun proses ini kadang memakan waktu lebih lama karena penyelarasan kepentingan, hal tersebut dianggap penting untuk memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan. Kapasitas Disperkimtan dalam memfasilitasi partisipasi ini juga meningkat signifikan selama pelaksanaan program, bertransformasi dari pendekatan top-down menuju dialog yang lebih inklusif.

Kedua, dalam hal akses terhadap sumber daya, Disperkimtan menunjukkan kapabilitas yang cukup baik dalam mengelola sumber daya finansial, manusia, serta informasi. Dana program tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga dari APBD dan CSR perusahaan lokal, dengan realisasi anggaran mencapai 97% dari target. Pendanaan juga didukung kontribusi masyarakat secara in-cash dan in-kind. Dari sisi SDM, Disperkimtan membentuk tim kompeten yang mencakup bidang infrastruktur, sosial, dan pemberdayaan masyarakat serta merekrut fasilitator berkeahlian spesifik. Dalam pengelolaan informasi, dinas rutin mengikuti pelatihan dan aktif dalam forum koordinasi Program KOTAKU tingkat provinsi dan nasional. Namun, tantangan tetap ada seperti keterlambatan pencairan dana dan kekurangan tenaga ahli tertentu.

Ketiga, Disperkimtan telah melakukan upaya pengembangan kapabilitas baik internal maupun eksternal. Internal, staf program mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis, dan kesempatan studi banding untuk belajar dari daerah lain. Eksternal, masyarakat dan BKM menerima pelatihan teknis, administratif, dan organisasi serta pendampingan berkelanjutan dari tim fasilitator dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil program. Upaya ini

meningkatkan kapasitas pengelolaan program di tingkat lokal dan memunculkan inisiatif-inisiatif pengembangan kawasan yang mandiri.

Keempat, dalam aspek kemandirian dan otonomi, Disperkimtan memiliki ruang yang cukup untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan lokal, termasuk mengintegrasikan Program KOTAKU dengan pengembangan kampung wisata di Kelurahan Tanjung Riau. Dinas juga mengelola dan mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas program serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Namun, terdapat keterbatasan akibat regulasi dan prosedur administratif pusat yang kurang fleksibel serta ketergantungan signifikan pada pendanaan APBN, yang dapat menghambat inovasi dan respons cepat di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, Disperkimtan mengembangkan strategi penguatan kapasitas manajemen, mekanisme pendanaan alternatif, dan advokasi penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Dengan demikian, dimensi kebebasan pelaku pada Disperkimtan menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun masih menghadapi beberapa kendala struktural dan administratif.

### **B. Analisis Dimensi Kebebasan Kesejahteraan (Well-being Freedom)**

Dimensi kebebasan kesejahteraan (well-being freedom) dalam teori kapabilitas Amartya Sen merujuk pada kemampuan institusi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan individu atau kelompok mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau, Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam menunjukkan kapabilitas yang cukup baik dalam mewujudkan kebebasan kesejahteraan masyarakat. Pertama, Disperkimtan berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan melalui pembangunan pelantar lingkar, perbaikan sistem drainase, pengelolaan persampahan, fasilitas sanitasi, penerangan umum, serta ruang publik seperti Plaza Utama. Meskipun demikian, tantangan seperti pemeliharaan infrastruktur, cakupan layanan di area terpencil, dan integrasi dengan sistem kota masih perlu perhatian. Kedua, partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana program difasilitasi secara aktif melalui pemetaan swadaya, Focus Group Discussion (FGD), Musrenbang khusus, workshop, dan konsultasi publik, yang memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program meskipun keterbatasan waktu dan kesenjangan kapasitas masih menjadi kendala. Ketiga, Program KOTAKU berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan peningkatan kesehatan lingkungan, aktivitas ekonomi, interaksi sosial, rasa aman, nilai properti, serta pendapatan masyarakat. Namun, kesenjangan manfaat dan keberlanjutan dampak menjadi tantangan yang harus diatasi. Terakhir, Disperkimtan juga mendorong kemandirian masyarakat dengan memperkuat kelembagaan lokal, pembentukan kelompok pemelihara infrastruktur dan swadaya, pengembangan keterampilan usaha, serta mekanisme pendanaan lokal. Meskipun ada kemajuan, ketergantungan pada pendampingan, keberlanjutan finansial, dan regenerasi kepemimpinan masih menjadi fokus perbaikan. Secara keseluruhan, Disperkimtan Kota Batam telah menunjukkan kapabilitas yang signifikan dalam melaksanakan Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau, yang tercermin dari peningkatan akses, partisipasi, kualitas hidup, dan kemandirian masyarakat, walaupun beberapa tantangan masih perlu ditangani demi keberlanjutan program.

### **3.3 Dampak Program KOTAKU terhadap Pendapatan Masyarakat**

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung Riau tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan fisik, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana penataan kawasan kumuh melalui Program KOTAKU telah berkontribusi pada

peningkatan ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Riau, yang terutama tercermin dalam peningkatan pendapatan.

### **A. Peningkatan Aktivitas Ekonomi**

Program KOTAKU telah berhasil menciptakan kondisi yang kondusif untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Kelurahan Tanjung Riau melalui penataan kawasan yang meliputi pembangunan pelantar lingkar, pelantar penghubung, plaza utama, dan perbaikan jalan akses. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan, Bapak Eryudhi Apriadi, menyatakan bahwa Program KOTAKU dirancang tidak hanya untuk mengatasi permukiman kumuh, tetapi juga untuk mengangkat potensi ekonomi lokal dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi ini tercermin dari munculnya sentra ekonomi baru seperti plaza utama yang kini menjadi pusat usaha masyarakat dengan berbagai kios kuliner, oleh-oleh, dan kerajinan tangan. Selain itu, revitalisasi ekonomi pesisir melalui pembangunan pelantar memudahkan nelayan dalam bongkar muat dan pengolahan hasil laut sehingga omset penjualan meningkat. Program ini juga mendorong diversifikasi usaha masyarakat dengan munculnya bisnis jasa wisata dan homestay, memperluas peluang ekonomi di luar sektor perikanan. Data dari BKM menunjukkan peningkatan nilai transaksi ekonomi harian hingga 40% setelah pelaksanaan Program KOTAKU, menandakan keberhasilan program dalam mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan di Kelurahan Tanjung Riau.

### **B. Pengembangan UMKM**

Program KOTAKU telah memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat melalui stimulasi pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tanjung Riau. Dengan penataan kawasan dan penyediaan infrastruktur pendukung, tercipta ekosistem yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan menegaskan komitmen Disperkimtan untuk mendukung UMKM dengan berkolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan pendampingan usaha kepada masyarakat. Data menunjukkan pertumbuhan jumlah UMKM yang signifikan dari 45 unit pada tahun 2018 menjadi 108 unit pada tahun 2021, meningkat sebesar 140%. Selain kuantitas, kualitas UMKM juga meningkat melalui pelatihan dan pendampingan yang memfasilitasi peningkatan produk, pengemasan, dan pemasaran, sehingga produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Lebih jauh, penataan kawasan yang menarik minat pengunjung membuka akses pasar yang lebih besar, didukung pula oleh fasilitasi partisipasi pelaku UMKM dalam berbagai pameran dan expo di tingkat kota dan provinsi. Dengan demikian, Program KOTAKU berhasil memperkuat pertumbuhan UMKM di Kelurahan Tanjung Riau secara menyeluruh, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun akses pasar.

### **C. Peningkatan Pariwisata dan Daya Tarik Kawasan**

Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau berhasil meningkatkan daya tarik kawasan sebagai destinasi wisata yang signifikan, sehingga turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Penataan kawasan secara terpadu menjadikan Kampung Tua Tanjung Riau sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kepala Dinas menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata difokuskan pada potensi budaya Melayu dan kehidupan pesisir, dengan tetap menjaga keaslian serta kearifan lokal. Peningkatan jumlah kunjungan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program ini, di mana rata-rata pengunjung naik dari sekitar 500 orang per bulan pada 2018 menjadi 1.300 orang pada 2021, atau meningkat sebesar 160%. Selain itu, pengembangan atraksi wisata seperti Event Pesta Anak Pantai, yang menampilkan lomba perahu, demonstrasi penangkapan ikan

tradisional, dan festival kuliner hasil laut, semakin menarik minat wisatawan. Program KOTAKU juga mendukung wisata edukasi melalui Tourism Information Centre yang menjadi pusat informasi budaya Melayu dan kehidupan nelayan, memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjung, terutama pelajar. Di samping itu, rata-rata pengeluaran wisatawan meningkat dari Rp50.000 menjadi Rp120.000, naik 140%, yang menunjukkan pengunjung tidak hanya berkunjung singkat, tetapi juga menikmati kuliner, membeli oleh-oleh, dan menggunakan jasa wisata, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Kelurahan Tanjung Riau.

#### **D. Data Perubahan Pendapatan Masyarakat**

Survei sederhana yang dilakukan oleh RT dan RW Kelurahan Tanjung Riau terhadap 35 pelaku UMKM di sekitar area yang ditata melalui Program KOTAKU memberikan gambaran awal mengenai perubahan pendapatan masyarakat setelah pelaksanaan program tersebut. Sebanyak 80% responden melaporkan peningkatan pendapatan, dengan rata-rata pendapatan harian naik dari Rp75.000-Rp100.000 pada 2018 menjadi Rp150.000-Rp200.000 pada 2021, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Variasi peningkatan pendapatan berbeda-beda sesuai jenis usaha, di mana usaha kuliner mengalami kenaikan 70-100%, usaha kerajinan 40-60%, jasa wisata 90-120%, dan penjualan oleh-oleh 50-70%. Faktor utama peningkatan pendapatan adalah bertambahnya jumlah pengunjung (65%), perbaikan akses lokasi usaha (20%), diversifikasi produk (10%), dan pelatihan usaha (5%). Selain itu, survei mencatat bahwa 40% UMKM yang disurvei merupakan usaha baru yang muncul pasca-program, menunjukkan bahwa KOTAKU tidak hanya meningkatkan pendapatan usaha yang ada tetapi juga mendorong munculnya usaha baru. Testimoni dari pelaku UMKM seperti Ibu Mariati, penjual kuliner tradisional, menegaskan perubahan nyata ini, di mana pendapatan hariannya bisa meningkat hingga tiga kali lipat sejak pindah berjualan ke plaza utama. Meskipun survei ini terbatas dalam cakupan dan metode, hasilnya sejalan dengan pengamatan dari berbagai pemangku kepentingan yang menunjukkan perbaikan ekonomi masyarakat. Lurah Tanjung Riau menambahkan bahwa meskipun belum ada penelitian mendalam, tanda-tanda peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pembangunan rumah, bertambahnya kendaraan bermotor, dan partisipasi warga dalam kegiatan sosial. RT dan RW merekomendasikan survei yang lebih komprehensif di masa depan untuk mendapatkan gambaran dampak ekonomi yang lebih akurat dan inklusif. Secara keseluruhan, Program KOTAKU telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih baik melalui penataan kawasan kumuh di Kelurahan Tanjung Riau.

#### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung Riau tidak hanya berhasil memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Selain itu, program ini terbukti mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pendekatan berbasis budaya dan wisata pesisir, serta memperkuat kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam. Temuan ini memiliki titik temu dengan beberapa penelitian terdahulu, sekaligus mengisi celah yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya.

Sebagai contoh, Rahajuni dkk. (2018) dalam penelitiannya di Kabupaten Banyumas juga menemukan bahwa Program KOTAKU memberikan dampak multidimensi yang mencakup perbaikan ekonomi, penguatan nilai sosial, serta peningkatan kesadaran lingkungan berbasis

kearifan lokal. Hal serupa terlihat di Kelurahan Tanjung Riau, di mana revitalisasi kawasan pesisir tidak hanya menciptakan ruang publik dan akses infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memunculkan kegiatan ekonomi baru seperti wisata budaya, usaha kuliner, dan jasa wisata lokal. Ini menunjukkan bahwa pendekatan penataan kawasan yang terintegrasi dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, studi oleh Aguspriyanti dkk. (2020; 2022) yang secara khusus meneliti kawasan Kampung Tua Tanjung Riau mengidentifikasi penyebab kekumuhan seperti kepadatan bangunan, buruknya sanitasi, dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa intervensi KOTAKU berhasil menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui pembangunan pelantar, drainase, toilet umum, dan ruang publik. Namun, yang menjadi pembeda utama adalah fokus penelitian ini pada aspek peningkatan pendapatan dan dampak ekonomi langsung pasca-implementasi, yang belum menjadi perhatian utama dalam studi Aguspriyanti sebelumnya.

Di sisi lain, Sulaiman (2021) menyoroti kendala koordinasi dan ego sektoral dalam pelaksanaan KOTAKU di Kota Bandung. Meskipun hal ini juga menjadi tantangan di Kota Batam, terutama pada tahap awal perencanaan, penelitian ini menunjukkan bahwa Disperkimtan mampu mengembangkan kapasitas kelembagaan dan membangun kolaborasi antar-pemangku kepentingan secara efektif, termasuk dengan masyarakat, BKM, serta sektor swasta. Hal ini mencerminkan dimensi agency freedom dalam teori kapabilitas Amartya Sen, di mana institusi lokal memiliki kemampuan bertindak dan membuat keputusan secara otonom dan adaptif.

Adapun penelitian Aisyahwati (2018) mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KOTAKU masih menjadi tantangan. Dalam konteks Kelurahan Tanjung Riau, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat justru menjadi kekuatan utama, terlihat dari keterlibatan aktif dalam pemetaan partisipatif, perencanaan RPLP, hingga pengelolaan infrastruktur pasca-program. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sosial masyarakat, yang diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, dan kelembagaan lokal.

Secara umum, kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi analisis kapabilitas institusional Disperkimtan dengan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan UMKM dan pariwisata berbasis lokal. Celah ini belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu, yang umumnya lebih fokus pada aspek teknis infrastruktur atau dinamika sosial kelembagaan secara umum. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur tentang Program KOTAKU, khususnya dalam konteks wilayah pesisir dan kawasan budaya seperti Tanjung Riau.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam memiliki kapabilitas yang baik dalam mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung Riau. Mengacu pada teori kapabilitas Amartya Sen, Disperkimtan tidak hanya mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif, tetapi juga berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kesejahteraannya, khususnya melalui peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Program KOTAKU terbukti tidak hanya mengurangi tingkat kekumuhan, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal melalui intervensi fisik, sosial, dan ekonomi yang komprehensif serta partisipasi aktif masyarakat.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan data bersifat lokal dan spesifik pada satu kelurahan sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, data perubahan pendapatan diperoleh melalui survei sederhana yang jumlah respondennya terbatas dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga belum dapat memberikan gambaran statistik yang lebih representatif. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat program secara optimal.

Untuk arah penelitian ke depan, disarankan dilakukan studi lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam guna mengukur dampak ekonomi Program KOTAKU secara lebih komprehensif. Selain itu, penting untuk meneliti faktor-faktor keberlanjutan program pasca-implementasi, termasuk efektivitas kelembagaan lokal dalam pemeliharaan infrastruktur, keberlanjutan pendampingan usaha, serta pengaruh regulasi dan kebijakan pendukung terhadap pengembangan kapabilitas masyarakat dalam jangka panjang.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aguspriyanti, C. D., Nimita, F., & Deviana, D. (2020). Analisis faktor-faktor penyebab kekumuhan di permukiman pesisir Kampung Tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development*, 1(2). <https://doi.org/10.37253/jad.v1i2.1501>
- Aisyahwati, V. F. (2018). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/165854/>
- Arikunto, S. (2015). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Revisi). Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Ginting, A. M. (2021). Kemiskinan di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. *Kajian*, 26(1). <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v26i1.3908>
- Hu, G., Pan, W., Wang, J., & Shi, J. (2011). Impact antecedents of e-government content service capability: An exploratory empirical study. In *2011 International Conference on Business Computing and Global Informatization* (pp. 188–191). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BCGIN.2011.55>
- Hu, G., Shi, J., Pan, W., & Wang, J. (2012). A hierarchical model of e-government service capability: An empirical analysis. *Government Information Quarterly*, 29(4), 564–572. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.04.007>
- Marthalina, M. (2018). Peran pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.403>

- Muniandy, A., Ahmad, M., & Desa, M. A. (2024). Design and development of Housing Interview Management System for managing housing application. In Zakaria, N. H., Mansor, N. S., Husni, H., & Mohammed, F. (Eds.), *Computing and Informatics. ICOCI 2023*. Communications in Computer and Information Science (Vol. 2002). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-9592-9\\_22](https://doi.org/10.1007/978-981-99-9592-9_22)
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian* (Cetakan ke-10). Ghalia Indonesia.
- Nurdin, I., & Hartati. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Rahajuni, D. (2019). Dampak program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*, 8(1). <https://sinelitabmas.unsoed.ac.id/google-doc/2281630/dampak-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku-pada-masyarakat-miskin-di-kabupaten-banyumas>
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Riswanto, A. (2016). Kemiskinan: Faktor penyebab dan analisis pemecahan masalah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(1). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=985125&val=13618&title=KEMISKINAN%20FAKTOR%20PENYEBAB%20DAN%20ANALISIS%20PEMECAHAN%20MASALAH>
- Sadana, A. (2014). Perencanaan kawasan permukiman. *Graha Ilmu*, 6(1).
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>
- Susilawati, D., & Khairina, E. (2023). Strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Batam. *Dialektika Publik*, 7(1). <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>